

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU
DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA
KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

OLEH

WAN EZAH

NIM:11575200940



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU
DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA
KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

OLEH**WAN EZAH****NIM:11575200940****UIN SUSKA RIAU****PROGRAM S.1****JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WAN EZAH
 NIM : 11575200940
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA
 JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
 KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM
 MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA
 KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU

Disetujui Oleh
 Pembimbing

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717057

Mengetahui

Dekan,
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Saïd. HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi,
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

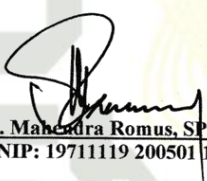
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WAN EZAH
 NIM : 11575200940
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA
 JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
 KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM
 MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA
 KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU

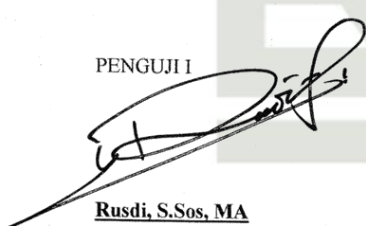
HARI/TANGGAL UJIAN: JUM'AT/27 SEPTEMBER 2019

PANITIA PENGUJI
 KETUA



Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec
 NIP: 19711119 200501 1 004

MENGETAHUI

PENGUJI I


Rusdi, S.Sos, MA
 NIP: 19720906 200710 1 002

PENGUJI II


Dr. Rodi Wahvudi, S.Sos, M.Soc, Sc
 NIK: 130 717 108

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU

OLEH
WAN EZAH
NIM. 11575200940

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan publik yang menangani dan menegakkan jaminan sosial terhadap perusahaan dan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sektor informal saat ini di Kota Pekanbaru menjadi pekerjaan yang mayoritas digeluti oleh para masyarakat guna memenuhi kebutuhannya serta pertumbuhan perekonomian. Namun saat ini juga terdapat masih minim tenaga kerja sektor informal yang mengikuti program perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja sektor informal di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja sektor informal di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan hasil pengamatan di lapangan, dengan metode ini peneliti menguraikan dan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh. Hasil dalam penelitian Analisis Upaya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru dikategorikan "Belum Optimal" karena masih terlihat cukup banyak dari sekian banyaknya tenaga kerja informal yang belum mengikuti peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat dalam penelitian adalah berupa 1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tenaga kerja informal terhadap jaminan sosial 2) perusahaan kecil dan mikro yang terbebani oleh iuran bulanan paar pekerja 3) Masyarakat umumnya dan tenaga kerja informal khususnya masih terfokus pada BPJS Kesehatan 4) SDM BPJS Ketenagakerjaan dan pemasaran yang belum optimal sepenuhnya serta sosialisasi yang dilakukan masih belum sering dilakukan terhadap tenaga kerja sektor informal.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Peserta, Perusahaan dan Tenaga Kerja Informal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan sepenuh hati yang meliputi pengertian puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat, taufiq dan hidayah serta nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada para Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah mendidik ummatnya dengan hasil yang sangat cemerlang semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita termasuk golongan para ahli surga.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru**". Dalam penulisan skripsi ini tentunya memiliki hambatan dan kesulitan seiring proses pembuatannya, namun karena bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerja sama dari beberapa pihak khususnya pembimbing, hambatan dan kesulitan yang dihadapi akhirnya dapat teratasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan ketulusan hati dan senang hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Kepada kedua orang tua tersayang peneliti yaitu Ibunda Aisyah Jasmin dan Ayahanda Sukiman. Karena do'a, kasih sayang, cinta, dan didikan serta kasih sayang yang mereka berikan kepada peneliti sehingga dapat mencapai kesuksesan dengan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1)

Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Drs. Muh. Said HM, M Ag, MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

5. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.KP sebagai sekretaris Jurusan Administrasi Negara

6. Ibu Sitti Rahmah, Dra. Hj, M. Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah mengarahkan serta memberikan masukan kepada peneliti selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst S. IP, M.Si sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak mengarahkan dan membantu sampai pada ujian munaqasah

Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan kepada peneliti, serta seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Bapak Suhaimi Ali dan Bapak Febri selaku kepala bidang dan staff BPJS Ketenagakerjaan kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi

10. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

11. Kepada sahabat-sahabat Puja Sentosa, Rohimah Siregar, Dewi Sasmita, Dewi Ulfayanti, Nurlela, Alwiya Sari, Eti Kurnia, Dwi Citra Jayati, Bejo Hutanto dan Novit Bahtiar yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ide dan motivasi mengenai penulisan tugas akhir skripsi ini

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan lokal Administrasi Negara D angkatan 2015 yang telah memberikan keceriaan suka maupun duka bersama dan memberikan semangat satu sama lain dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini

13. Kepada rekan-rekan KKN Uin Suska Riau Desa Koto Aman tahun 2018 yang telah memberikan semangat dan motivasi terhadap penulisan tugas akhir skripsi

14. Dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang, akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alam
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

Wan Ezah
NIM: 11575200940

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.5 Sistematika Penulisan..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik..... 14

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik..... 14

2.1.2 Proses Kebijakan Publik 16

2.1.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik..... 19

2.2 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 20

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 20

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 21

2.2.3 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 24

2.3 Konsep Tenaga Kerja..... 25

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja 25

2.3.2 Pasar Tenaga Kerja 27

2.3.3 Tenaga Kerja Formal dan Informal..... 28

BAB III

BAB IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	31
2.4.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	31
2.4.2 Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	32
2.5 Konsep Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	37
2.6 Perspektif Islam terhadap Kepedulian Sosial Tenaga Kerja	38
2.7 Penelitian Terdahulu	40
2.8 Definisi Konsep	43
2.9 Konsep Operasional	44
2.10 Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Informan Penelitian	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Metode Analisis/Teknik Analisa Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	51
4.2 Sejarah Singkat Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	52
4.2.1 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	54
4.2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	55
4.2.3 Tugas Pokok Fungsi BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	57
4.2.4 Fungsi Wewenang Hak BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	67

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	71
5.2 Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepsertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru	72
5.2.1 Sosialisasi (Pembinaan)	74
5.2.2 Pengendalian	83
5.3 Hambatan Peningkatan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau di Kota Pekanbaru	93

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Pekerja Formal dan Informal Kota Pekanbaru	8
Tabel 1.3	Data Perusahaan Besar dan Menengah Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 1.4	Data Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	10
Tabel 2.1	Perbedaan Primary Labour Market dan Secoundary Labour Market	27
Tabel 2.2	Perbedaan Sektor Formal dan Informal	30
Tabel 2.3	Indikator Penelitian	44
Tabel 3.1	Informan Penelitian	48
Tabel 5.1	Agenda Kerjasama	87
Tabel 5.2	Presentase Penambahan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal .	92

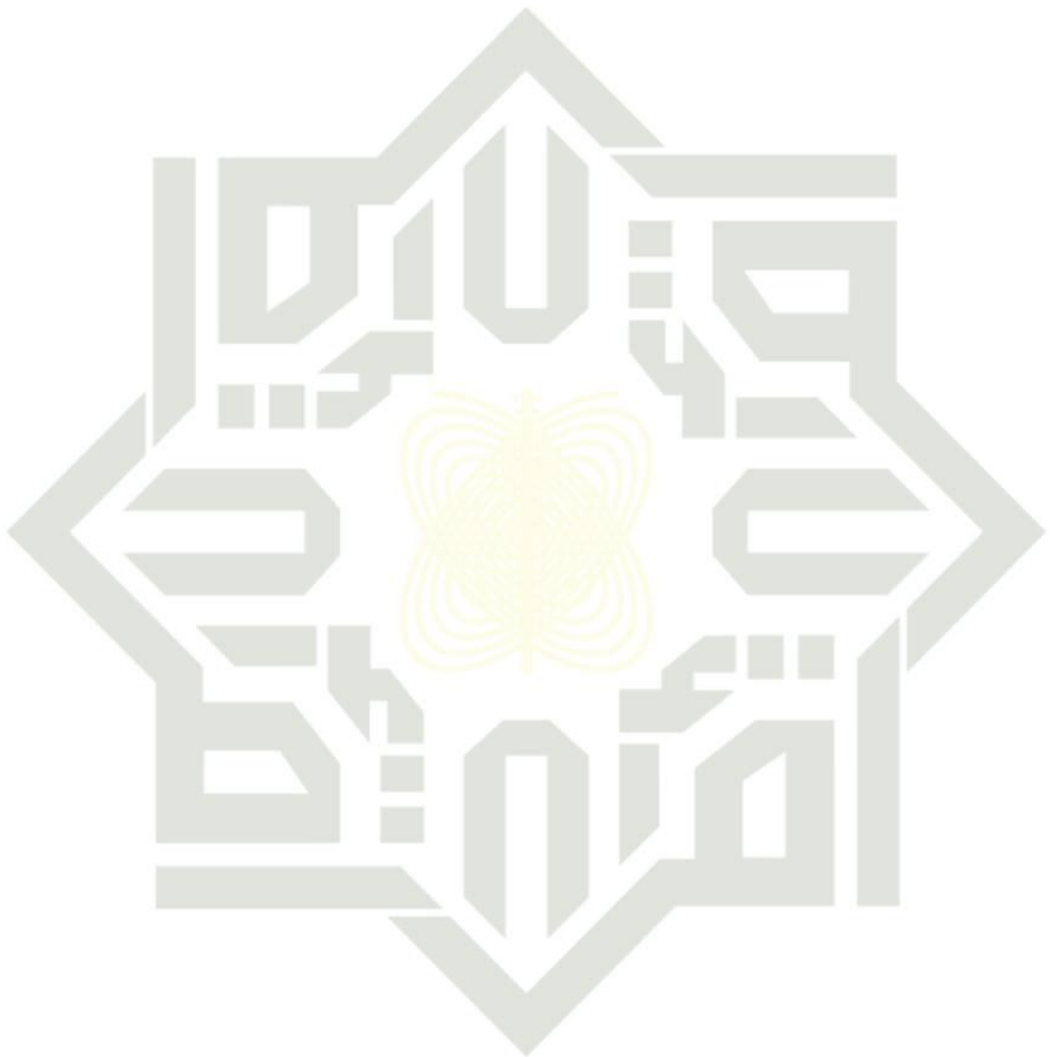


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	56
Gambar 4.2	Logo BPJS Ketenagakerjaan	70



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Dokumentasi
- B. Daftar wawancara
- C. Surat Keterangan Pembimbing
- D. Surat Izin Pra Riset Penelitian
- E. Surat Izin Riset Penelitian
- F. Surat Balasan Instansi/telah melakukan kegiatan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan perekonomian bangsa ini. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja dan badan instansi yang melindungi hak dan kesejahteraan para tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi dan keinginan dalam membangun dan menegakkan hak dan kewajiban serta harkat martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Pembangunan ketenagakerjaan harus di atur dengan baik dan efektif sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban para tenaga kerja sebagai pelaku utama pembangunan nasional sebagai suatu kesatuan dalam mengembangkan dunia usaha, bisnis dan industri bangsa.

Dalam konteks pembangunan nasional maka hal perlindungan ketenagakerjaan perlu adanya peran penting karena memiliki dimensi keterkaitan, tidak hanya keterkaitan kepentingan tenaga kerja sebatas di lingkungan kerja namun juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha atau perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Maka perlu adanya upaya yang efektif dari badan dan

l lembaga yang mengeluarkan program-program peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pelayanan penempatan kerja, dan pembinaan hubungan perusahaan dan industrial. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional antar pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan paradigma dengan banyak pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, pekerja/buruh dan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan dan kesamaan hak didepan pihak manapun dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja, pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas atau program kesejahteraan (Pasal 100 ayat 1 UU No. 13/2003).

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan landasan dan kepastian hukum tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU tersebut mengamanatkan PT. Jamsostek berubah menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015, bagi seluruh pekerja di Indonesia termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan hal yang menyangkut perluasan dan peningkatan kepesertaan baik tenaga kerja maupun perusahaan adalah menjadi patokan utama bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan merata bagi semua lapisan tenaga kerja. Mengingat program BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang mengutamakan kesejahteraan para tenaga kerja beserta keluarganya, maka hak-hak dan sebagai seorang pekerja baik formal dan non formal sangat di prioritaskan jika terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau merupakan kota dimana jumlah penduduk yang jumlahnya semakin pesat setiap tahunnya dengan jumlah peningkatan 4,06% per tahunnya, disamping jumlah penduduk yang kian pesat jumlah pembangunan infrastruktur juga semakin pesat dapat dilihat dari banyaknya perusahaan makro dan mikro yang sedang berdiri di kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga kota Pekanbaru saat ini dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan bisnis dan industri di wilayah Sumatera. Melihat kondisi pembangunan di kota Pekanbaru cukup berkembang pesat maka tenaga kerja pendatang dari dalam Kota Pekanbaru maupun dari luar kota pekanbaru juga semakin meningkat. Hal ini juga menyebabkan jumlah penduduk kota Pekanbaru semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut data jumlah perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di kota Pekanbaru 3 tahun belakangan dari tahun 2016-2018. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 1.883.64 jiwa per Km² dengan luas wilayah 632,27 Km persegi di Provinsi Riau.

Table 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

NO	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	533.217 Jiwa	504.901 Jiwa	1.038.118 Jiwa
2	2017	546.400 Jiwa	518.166 Jiwa	1.064.566 Jiwa
3	2018	559.917 Jiwa	531.171 Jiwa	1.091.088 Jiwa
Jumlah		1.639.534 Jiwa	1.554.238 Jiwa	3.193.772 Jiwa

Sumber data : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Dari tabel tersebut jumlah penduduk di kota Pekanbaru tersebut maka dapat dilihat bahwa penduduk kota Pekanbaru terus meningkat secara signifikan karena jumlah pendatang transmigrasi dari beberapa pulau jawa dan Kalimantan, urbanisasi maupun jumlah pendatang yang tetap dan tidak tetap dari luar negeri di asia tenggara dengan cukup padat , ini menandakan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja, pencari kerja dan bahkan pengangguran dari beberapa kalangan usia di kota Pekanbaru juga terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk di kota Pekanbaru. Senada dengan hal tersebut, kemajuan kota Pekanbaru dibidang perekonomian dan berdirinya perusahaan swasta maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Industri turut memberikan beberapa problema dalam hal jaminan dan asuransi sosial terhadap para pedagang, pengusaha maupun karyawan biasa. Permasalahan yang terlihat umum namun juga menjadi tugas maupun upaya pemerintah khususnya dibidang penegak jamian sosial perlu melakukan strategi baru supaya dapat meningkatkan kesadaran akan kebutuhan para tenaga kerja selain dari sisi keuntungan gaji atau upah.

Keadaan segi ketenagakerjaan di kota Pekanbaru sangat beragam mulai dari iklim geografis susuan kota Pekanbaru, jumlah urbanisasi dari berbagai kota yang tersebar di Indonesia yang mencari pekerjaan di kota Pekanbaru dan jenis pekerjaan yang ada di kota pekanbaru membuat tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memenuhi tunjangan hajat hidup yang baik dan efektif sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “... Mewujudkan pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam konteks menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan harus banyak melibatkan beberapa lembaga atau pihak termasuk dari kalangan masyarakat untuk menguatkan sistem kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Pekanbaru.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di kota Pekanbaru cukup terbilang bervariasi seperti perusahaan utama atau besar, menengah, kecil dan mikro. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sektor tersendiri dan bergerak di bidang yang digeluti, ini menandakan bahwa para pekerja dari perusahaan tersebut juga berbeda dalam hal tantangan pekerjaan. Selain itu, di kota Pekanbaru cukup



banyak para pekerja atau karyawan diluar perjanjian kontrak kerja seperti tenaga kerja mandiri (Pedagang kecil, nelayan, petani, dan lain-lain), buruh perorangan dan para pekerja yang terikat kontrak kerja seperti pekerja jasa kontruksi atau pekerja proyek-proyek besar dan pekerja jasa jalan tol yang diberi pekerjaan oleh pemerintah langsung. Melihat berbagai jenis sektor pekerjaan yang ada di kota Pekanbaru yang masih memiliki peluang besar untuk target kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu dari sektor non formal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Melihat permasalahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih terbilang minim terutama dari sektor perusahaan kecil dan mikro serta pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam beberapa tahun belakangan karena disebabkan kurang optimalnya potensi pendataan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta kurangnya pengetahuan para perusahaan beserta tenaga kerja/buruh mengenai fasilitas, aturan dan teknis dan manfaat lainnya dalam BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota.2018). Selain karena penyebab tersebut, ada beberapa penyebab lain yang membuat masih minimnya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

1. Banyaknya para tenaga kerja yang belum mengenal BPJS Ketenagakerjaan itu apa dan bertujuan apa
2. Jumlah tenaga kerja non formal seperti buruh melebihi dari PNS sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam mendaftarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masih ada tenaga kerja seperti pelaku usaha UMKM yang kurang peduli dan enggan dalam mengetahui keutamaan dalam menggunakan jasa BPJS Ketenagakerjaan
4. Masih belum terwujud sepenuhnya sosialisasi dan strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaring cakupan peserta di seluruh kota Pekanbaru
5. Kesadaran masyarakat terutama para tenaga kerja non formal terhadap asuransi masih rendah

Peningkatan jumlah penduduk di kota Pekanbaru dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor formal I dan non formal. Kondisi ini berlaku dalam kondisi perekonomian di negara mana pun termasuk di kota Pekanbaru sendiri. Tenaga kerja sektor non formal umumnya bekerja di segala jenis pekerjaan dengan tanpa adanya perlindungan negara dan tidak dikenakan pajak. Sedangkan tenaga kerja formal umumnya bekerja di jenis pekerjaan tertentu dan biasanya ada perlindungan sosial dari negara dan dikenakan anggaran dalam asuransi tersebut. Meningkatkannya tenaga kerja non formal daripada tenaga kerja formal di kota Pekanbaru karena disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah meningkatnya jumlah migrasi, urbanisasi maupun pencari kerja lulusan SMA daripada jenjang pendidikan sarjana maupun diploma.

Dalam konteks kepesertaan yang ditargetkan oleh BPJS Ketenagakerjaan memang adalah yang didahulukan adalah para tenaga kerja dari sector formal karena pemerintah dan pihak BPJS Ketenagakerjaan kota Pekanbaru telah menuangkan kebijakan yang termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2015 tentang

peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dari periode tahun 2013-2019. Sementara itu khususnya di kota Pekanbaru program perluasan kepesertaan asuransi/jaminan sosial pada pekerja informal secara bertahap menargetkan minimum 1,3 juta peserta baru pada tahun 2015; 1,9 juta peserta baru pada tahun 2016; 2,5 juta peserta baru pada tahun 2017; 3 juta peserta baru pada tahun 2018, dan minimum 3,5 juta peserta baru pada tahun 2019.

Tabel 1.2 Jumlah Pekerja Formal dan Non Formal di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

No.	Jenis Pekerjaan	2016	2017	2018
A.	Formal			
1.	PNS	8.057	9.369	7.848
2.	Pensiun	29.373	12.720	532
3.	Buruh Industri	30.157	30.169	28.665
Jumlah Pekerja Formal		67.587	52.258	37.045
B.	Non Formal			
5.	Petani	12.758	12.658	27.750
6.	Buruh Bangunan	32.487	32.597	40.654
7.	Nelayan	12.658	12.349	27.740
8.	Pengusaha	28.628	28.628	30.366
9.	Pedagang	197.631	7.800	185.809
10.	Lainnya	26.492	25.490	18.794
Jumlah Pekerja Non Formal		310.654	119.522	331.113
Total jumlah pekerja di Kota Pekanbaru		378.241	171.780	368.158

Sumber data : Data Olahan BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Selanjutnya, jumlah kepesertaan perusahaan yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan di kota pekanbaru masih terbilang minim, karena ada beberapa perusahaan kecil dan mikro serta tenaga kerja mandiri yang tidak mendaftarkan karyawan atau tenaga kerjanya didalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru. Adapun jumlah peserta perusahaan yang ikut dan tidak ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru, peran serta tanggung jawab tiap manajer dan pimpinan perusahaan dapat di evaluasi dari bagaimana

mereka merekrut dan memiliki kepedulian sosial terhadap keadaan dan kebutuhan lahir dan batin para tenaga kerja dengan mendaftarkan perusahaan baik dinas maupun non dinas beserta karyawan, pekerja/buruh dan tenaga kerja yang lainnya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan tenaga kerja (K3) dan keluarganya. Masih minimnya jumlah kepesertaan tenaga kerja informal atau BPU dari sektor usaha kecil dan mikro dan mandiri yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan di kota pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor biaya iuran dan kendala kesadaran tenaga kerja dan strategi sosialisasi yang kurang menyeluruh terhadap pekerja informal di Kota Pekanbaru .

Minimnya kepesertaan perusahaan kecil dan mikro serta pekerja BPU juga disebabkan oleh belum tersebar luasnya pengetahuan dan pengenalan dari sebagian tenaga kerja informal serta badan usaha kecil yang ada di kota Pekanbaru terhadap eksistensi keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan sosial terhadap tenaga kerja.

Tabel 1.3 Data Perusahaan Besar dan Menengah di Kota Pekanbaru

No.	Perusahaan	Jumlah (Perusahaan)
1.	Industri Makanan	167
2.	Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri alat angkut, Industri pengolahan, dan Jasa reparasi dan jasa pemasangan mesin peralatan	11
3.	Industri kayu, perabot, bambu dan rotan	6
4.	Industri kertas dan barang dari kertas	5
5.	Industri percetakan dan produksi alat media rekam	5
6.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	10
7.	Industri bahan karet dan plastic	13
8.	Industri barang galian bukan logam	5
9.	Industri Furnitur	6
10.	Industri tambang dan logam dasar	5
Jumlah		233

Sumber :Data BPS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga Kota Pekanbaru juga banyak didominasi oleh sektor UMKM yang banyak bergerak di sektor informal dimana saat ini jumlah terbesar di seluruh wilayah Riau yaitu adalah di Kota Pekanbaru dengan jumlah sebesar 68.728 UMKM. Pertumbuhan sektor UMKM dalam berbagai bidang di Kota Pekanbaru sangat cepat tumbuh yaitu 5 sampai 10% angka pertumbuhan setiap tahunnya. Saat ini jumlah UMKM sektor informal di bidang perdagangan sebanyak 77.156, bidang jasa 19.656, bidang produksi 12.760 dan bidang industri 11.320.

Seiring dengan berjalannya waktu maka program BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program dan mengolah data kepesertaan mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Berikut tabel kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016-2017

Tabel 1.4 Data Jumlah Tenaga Kerja Dan Perusahaan yang Aktif Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

No	Uraian kepesertaan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Perusahaan aktif	4.493	3.978	5.992
2	Proyek Perusahaan	986	1.467	2.242
3	Jasa Kontruksi Aktif			
4	Penerima Upah (PU)			
5	Tenaga kerja aktif	337.615	404.463	393.198
6	Penerima Upah (PU)			
7	Tenaga kerja Proyek	813.217	1.214.097	2.722.174
8	Aktif			
9	Tenaga Kerja Aktif	986	1.200	1.612
10	Bukan Penerima			
11	Upah (BPU) /			
12	Informal			

Sumber: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru kota, bahwa dari tahun ke tahun peserta dan perusahaan besar dan kontruksilah yang cukup banyak aktif sebagai peserta BPJS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketenagakerjaan tetapi tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja (BPU) yang sedikit jika dibandingkan jumlah yang tidak terhitung yang ada di sekitaran kota Pekanbaru. Namun pada data tersebut, tahun 2017 mengalami sedikit penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan dan meingkat pada tenaga kerja Penerima Upah (PU). Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya BPJS ketengakerjaan kantor wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di kota Pekanbaru ?
2. Faktor Penghambat apa saja dalam upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah I Riau tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya BPJS ketengakerjaan kantor wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peningkatan kepesertaan tenaga kerja informal BPJS Ketenagakerjaan di kota Pekanbaru.



Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembangunan nasional, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah , perusahaan dan dinas ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Pekanbaru.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan bagi penulis khasanah hukum di Indonesia.
3. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penulis dan masyarakat umum

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis membagi 6 (enam) bab pokok bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini di uraikan mengenai telaah pustaka yang berhubungan dengan pengertian mengeni, Kebijakan Publik,Tenaga Kerja, Manajemen Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan dan Kepesertaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data dan analisa data, serta informan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum Kota Pekanbaru, sejarah singkat pendirian BPJS Ketenagakerjaan , Visi dan misi Struktur,tugas, hak dan wewenang dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah, yang terdiri dari analisa-analisa tentang Analisis Upaya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini di jelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang di ambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANSADAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakn (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person jabatan yang berwenang. Untuk Syafiie mendefinisikan kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2004:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan public, menurutnya bahwa “ Public Policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi

yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kersangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya”. Disamping itu, Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan bahwa kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintahan serta prilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan dengan Easton dalam Toha (1991:60) mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerimtah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. Sementara itu, Koontz dan O’Donnel (1972:113) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.

Dissamping uraian beberapa definisi tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta acara bertindak (tentang oerintah, organisasi, dan sebagainya).

Dapat disimpulkan beberapa pengertian kebijakan diatas adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Proses analisis suatu kebijakan adalah suatu proses intelektual yang dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan tetap. Proses dalam tahap kebijakan adalah :

1. Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini masalah akan dimasukkan kedalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai focus pembahasan masalah mungkin ditunda pembahasannya atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan harus secara jeli dalam melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan dengan tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah tersebut ditentukan masalah yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan focus pembahasan.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga tahap legitimasi kebijakan (policy legitimation) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi, masalah yang telah dijadikan sebagai focus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bambang Sunggono (1994:149) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

- a. Isu Kebijakan disebabkan implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakn, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakn yang akan ditetapkan, selanjutnya karena kebijakn yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti, penyebab lainnya timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- b. Informasi yaitu kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada.
- c. Dukungan yaitu pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengeimplentasiannya tidak cukup dukunagn untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi yaitu berkaitan dengan diferensiasi tugas da wewenang organisasi pelaksana. Strukur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditndai oleh adanya pembatasan-pembatasa yang kurang jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan itu Anderson (1978:92) menyatakan bahwa dalam implementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
- b. Hakikat proses administrasi
- c. Kepatuhan ata suatu kebijakan dan
- d. Efek atau dampak dari implementasi

Pandangan ini menunjukkan bahwa imolementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakn telah meraih hasil yang diinginkan. Penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan.

2.1.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Solichin Abdul Wahab, kebijakan public memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakn tidak hanya mencakup keputusan dan membuat undang-undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya
3. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memepengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat.
4. Pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang penting bahkan dapat dikatakan bahwa hakikatnya manajemen itu adalah manajemen yang sentik dengan manajemen itu sendiri. (Buchari Zainun:2001) sedangkan menurut

Melayu Hasibuan Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan.

Istilah manajemen sumber daya manusia (MSDM) kini semakin populer, menggantikan istilah personalia. Meskipun demikian istilah personalia ini masih tetap dipergunakan dalam banyak organisasi untuk memahami departemen yang menangani kegiatan-kegiatan seperti rekrut pegawai, tenaga kerja, pemberian kompensasi dan pelatihan karyawan. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dikumpulkan dalam sistematis yang disebut manajemen sumber daya manusia.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan dalam MSDM adalah :

1. Tujuan organisasional, ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi.
2. Tujuan fungsional, ditujukan untuk mempertahankan fungsi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan social, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negative terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan.
4. Tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat meningkatkan kontribusi individual terhadap organisasi.

Fungsi MSDM (Melayu S.P 2009) adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian.

1. Perencanaan SDM, dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan-keperluan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas untuk suatu periode waktu yang pasti dan dapat membuat dan menentukan bagaimana keperluan-keperluan itu dapat terpenuhi
2. Pengorganisasian, kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.
3. Pengarahan, kegiatan mengarahkan semua agar karyawan agar mau bekerja dengan baik, mau bekerja sama, pimpinan menugaskan bawahan agar semua tugasnya dikerjakan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengendalian, kegiatan mengendalikan semua karyawan mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana, apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan diadakan perbaikan.
5. Pengadaan (*procerument*), proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan, dalam konteks SDM pengembangan dipandang sebagai peningkatan kualitas SDM melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan sehingga dapat menjelaskan tentang *developmental practice* dan membutuhkan kolaborasi dengan program-program MSDM untuk mencapai hasil yang diinginkan.
7. Kompensasi, sebagai usaha memberi balas jasa bagi karyawan yang telah menyumbang waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan dan keuntungan organisasi.
8. Pengintegrasian, ditujukan untuk menghasilkan situasi diaman terjadi penyusaian atau pencocokan antara kepentingan yang bersifat individual, organisasi maupun kemasyarakatan.
9. Pemeliharaan, ditujukan untuk usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan.
10. Pemutusan hubungan tenaga kerja, ditujukan untuk pemberhentian hubungan pekerjaan serta keteikatan perjanjian kerja anatara karyawan dan perusahaan yang disebabkan karyawan tidak mampu mengerjakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan dengan baik, kurangnya disiplin, melanggar aturan, tidak dapat bekerja sama, melakukan tindakan keji dan pemberhentian ini merupakan fungsi terakhir dari adanya MSDM.

2.3 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian strategi utama organisasi agar mampu berkembang pesat dan bersaing menghadapi tantangan ekonomi global yang bergerak cepat dan dinamis. Pelatihan dan pengembangan SDM menjadi hal penting dalam sebuah organisasi karena penempatan karyawan secara langsung dalam posisi jabatannya tidak memberikan jaminan karyawannya tersebut akan berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

1. Fungsi Pengembangan SDM

Pengembangan SDM merupakan fungsi yang dapat berdiri sendiri ataupun dapat merupakan salah satu fungsi utama dari bagian MSDM. Ada 3 fungsi utama pengembangan SDM yaitu :

- a. Pelatihan dan pengembangan
- b. Pengembangan organisasi
- c. Pengembangan karir

Selain itu, pelatihan dan pengembangan memberi penguatan kepada karyawan mengenai kompetensi yang dipersyaratkan organisasi, sehingga menumbuhkan jaminan keamana jabatan (*job security*) karena disaat terjadi kompetisi ketat dalam organisasi dimana persoalan produktivitas menjadi salah satu penentu dan kualitas karyawan dipertanyakan program

pelatihan dan pengembangan SDM dapat memberi jaminan pencapaian ketiga persoalan tersebut pada peringkat organisasional.

Konsep Tenaga Kerja

2.3

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap orang yang sudah mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat disebut sebagai tenaga kerja. Menurut Payaman Simanjuntak (2001), tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia.

Seperti dikatakan oleh S. Mulyadi bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Pasar tenaga kerja tidak berbeda jauh dengan pasar barang yang ada menurut pandangan kaum klasik. Akan terjadi keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja, apabila harga tenaga kerja (upah) cukup fleksibel. Pada tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang berlaku tersebut sehingga tenaga kerja tidak akan mengalami pengangguran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja mencakup segala kerja manusia yang diarahkan untuk mencapai hasil produksi, baik berwujud jasa, fisik maupun mental. Tenaga kerja meliputi buruh maupun manajerial. Karakter terpenting tenaga kerja dibandingkan dengan faktor produksi lain adalah karena mereka manusia, sehingga isu-isu kemanusiaan harus selalu diperhatikan. Beberapa isu penting ini misalnya bagaimana hubungan antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, bagaimana memberi harga atas tenaga kerja, serta bagaimana menghargai unsur-unsur keadilan, kejiwaan, moralitas dan unsur-unsur kemanusiaan lain dari tenaga kerja.

Secara lebih lanjut, Oemar Hamalik (2000:7-8) mengemukakan bahwa tenaga kerja memiliki beberapa aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensial-potensial hereditas yaitu bersifat dinamis dan dapat berkembang
2. Aspek profesional atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu dan dengan kemampuan dan keterampilan itu dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang optimal
3. Aspek fungsional, setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna artinya bekerja dengan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya
4. Aspek operasional, setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Aspek personal, setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang keberhasilan pekerjaannya
6. Aspek produktivitas, setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari pekerjaannya baik dari kualitas dan kuantitas

Berdasarkan beberapa uraian pengertian tenaga kerja diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensi, kemampuan dan ketrampilan, yang tepat guna, berdaya guna dan berprestasi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

2.3.2 Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja dibedakan dalam dua golongan pasar tenaga kerja (*dual labor market*), yaitu pasar tenaga kerja utama atau *primary labor market* dan pasar kerja biasa atau *secondary labor market*. Perbedaan keduanya ditunjukkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Primary labor market dan Secondary labor market

Primary labor market	Secondary labor market
1. Skala Perusahaan besar	1. Skala perusahaan kecil
2. Manajemn perusahaan yang baik	2. Manajemen perusahaan kurang baik
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi	3. Tingkat pendidikan dan ketersmpilan rendah
4. Produktivitas kerja karyawan tinggi	4. Produktivitas kerja rendah
5. Upah tinggi	5. Upah rendah
6. Jaminan sosial baik	6. Jaminan sosial kurang baik
7. Lingkungan pekerjaan yang menyenangkan	7. Lingkungan pekerjaan yang kurang menyenangkan
8. Disiplin kerja pegawai tinggi	8. Disiplin kerja karyawan rendah
9. Tingkat absensi rendah	9. Tingkat absensi tinggi
10. Jumlah perpindahan pegawai biasanya kecil	10. Karyawan sering berpindah-pindah pekerjaan

Pada dasarnya tenaga kerja adalah tidak homogen akan tetapi bersifat heterogen, sehingga terdapat beberapa pasar tenaga kerja seperti pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar tenaga kerja yang membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya pendidikan yang cukup besar. Sehingga dalam pemenuhannya baik pengusaha maupun tenaga kerjanya sendiri membutuhkan waktu yang relatif lama karena masing-masing mencari penyesuaian dengan yang diinginkan. Sedangkan pasar tenaga kerja tidak terdidik merupakan pasar kerja yang menawarkan dan meminta tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Perbedaan lingkungan kerja juga mempengaruhi efektivitas pasar tenaga kerja, misalnya dalam sektor pemerintah dan sektor swasta. Analisa pasar kerja berdasarkan pendekatan penggunaan tenaga kerja (*labor utilization approach*) ternyata sangat rumit dan sulit dilaksanakan, terutama di Negara-negara berkembang. Sebab, didalam sistem pendekatan penggunaan tenaga kerja memperhitungkan adanya masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Sedangkan tenaga kerja setengah menganggur tersebut sangat dipengaruhi oleh masalah produktivitas dan tingkat pendapatan dari tenaga kerja masih sulit untuk diukur secara tepat.

2.3.3 Tenaga Kerja Formal dan Informal

Tenaga kerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada bidang usaha atau perusahaan yang memiliki izin dan terdaftar resmi di pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya tenaga kerja formal merupakan orang yang bekerja pada kantor atau industri resmi dari pemerintahan dan diikat oleh perjanjian kerja dan pembayaran pajak.

Ciri-ciri dari tenaga kerja atau usaha formal Wirosardjono (1985) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki izin resmi dari pemerintahan berupa surat yaitu SIUP
2. Memiliki akta pendirian usaha dan notaris
3. Wajib melaporkan keuangan dan pembayaran pajak di kantor pajak
4. Memiliki laporan keuangan yang jelas dan sistematis

Selanjutnya mengenai tenaga kerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada bidang usaha yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar resmi di pemerintahan yang artinya tenaga kerja informal merupakan usaha atau jenis pekerjaan yang tidak resmi dan tidak dikenakan pajak negara dan biasanya tenaga kerja informal bekerja pada usaha yang relative kecil dan mikro.

Ciri-ciri tenaga kerja pada sektor informal menurut Wirosardjono (1985) adalah sebagai berikut :

1. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam waktu, permodalan maupun permintaan
2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya bisa sering dikatakan liar
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapat rendah
6. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja
7. Umumnya tiap suatu usaha memperkerjakan tenaga sedikit dan dari hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama
8. Tidak mengenal suatu perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya

Tabel 2.2 Perbedaan Sektor Formal dan Sektor Informal

Karakteristik Usaha	Formal	Informal
Modal	Relatif besar dan mudah diperoleh	Kecil dan sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	Birokrasi	Lebih kepada organisasi keluarga
Permodalan	Dari lembaga keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
Serikat Buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
Sifat Wiraswasta	Berdikari	Sangat bergantung pada perlindungan pemerintah atau kebijakan impor
Persediaan Barang	Jumlah besar dengan kualitas tinggi	Jumlah kecil dengan kualitas rendah
Hubungan Kerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan asas saling percaya

Tenaga kerja pada sektor usaha informal disebut juga tenaga kerja yang bekerja diluar hubungan kerja. Usaha informal dianggap telah berjasa sebagai katub pengamanan karena mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor usaha formal. Hal ini disebabkan sektor usaha informal mudah dimasuki dan menerima tenaga kerja yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan ketrampilan tertentu. Pada umumnya tenaga kerja pada usaha-usaha informal

belum terjangkau oleh upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan.

2.4 Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2.4.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan:2017). Menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 02 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggara sistem jaminan nasional berdasarkan asas :

1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 04 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegotongroyongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan bersifat wajib
8. Dana Amanat
9. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta

2.4.2 Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perlu diketahui BPJS sebenarnya adalah program pemerintah untuk meningkatkan jaminan kesehatan, sosia dan ekonomi bagi setiap warga negara indonesia, tapi BPJS sendiri sebenarnya bukanlah program baru, namanya mungkin baru tapi program-program yang dijalankan oleh BPJS merupakan program peralihan dari program-program pemerintah sebelumnya yaitu :

1. Askes
2. Jamkesmas
3. Jamkesda
4. Jamsostek

Dari program-program tersebut lahirlah BPJS yang dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu BPJS kesehatan yang merupakan peralihan dari askes, jamkesda dan jamkesmas dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hasil transformasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau peralihan dari jamsostek dan juga program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang sebelumnya dimiliki oleh jamsostek.

1. BPJS Kesehatan

BPJS kesehatan adalah hasil transformasi dari askes, jamkesmas atau jamkesda, dulu mungkin sebagian orang mengenal Askes, nah sekarang askes sudah tidak ada dan ditransformasi menjadi BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan ini faktor utamanya adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga faktor usia muda bahkan sampai bayi, dan berlaku juga untuk warga asing yang sudah tinggal di faktor usia minimal selama 6 bulan. Jadi semua warga faktor wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dengan cara melakukan pendaftaran di kantor-kantor cabang BPJS yang sudah banyak tersedia di setiap pelosok kota. (Sumber: Jurnal Penelitian BPJS Cabang Semarang:2017).

Jenis kepesertaan dari BPJS kesehatan dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

a. BPJS Mandiri atau individu

BPJS mandiri Ini diperuntukan bagi warga dari golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan juga dari golongan bukan pekerja (BP), setiap warga yang termasuk kategori ini harus mendaftarkan dirinya dan juga anggota keluarganya yang tercatat di KK ke BPJS. Setiap peserta BPJS mandiri harus membayar iuran bulanan yang besar kecilnya ditentukan oleh kelas BPJS yang diambil. Ada 3 kelas BPJS yang dapat dipilih oleh peserta mandiri yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) BPJS Kelas 1
- 2) BPJS kelas 2
- 3) BPJS kelas 3

Yang membedakan antara kelas tersebut adalah besar kecilnya iuran bulanan yang harus dibayarkan, umumnya kelas I paling besar diikuti oleh kelas II dan III, dan juga ruangan rawat inap yang akan menjadi haknya ketika peserta di rawat inap di rumah sakit, kelas I akan mendapatkan ruang kelas satu, begitu juga untuk kelas dua dan kelas tiga, sayangnya khusus untuk kelas 3 tidak dapat naik kelas perawatan.

b. BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU)

BPJS Jenis ini disebut sebagai BPJS badan usaha atau BPJS yang ditanggung perusahaan, diperuntukan untuk setiap karyawan perusahaan baik karyawan swasta, negeri PNS maupun TNI/ POLRI, untuk menjadi peserta BPJS PPU harus didaftarkan oleh perwakilan perusahaan dan tidak dapat daftar sendiri, iuran atau premi bulannya sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian dipotong dari gaji setiap pekerja, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan setiap karyawannya ke BPJS untuk menjadi peserta BPJS Badan usaha atau BPJS PPU.

BPJS jenis ini hanya berhak atas kelas I dan kelas II saja, dan pengambilan kelas ditentukan berdasarkan besar kecilnya gaji untuk masing-masing karyawan, setiap peserta BPJS ini sekaligus dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung 4 anggota keluarga inti, yaitu suami/istri, dan 3 orang anaknya. Jadi selain dibayarkan sebagian oleh perusahaan, dalam satu kali bayar BPJS ini sekaligus dapat menanggung iuran untuk 5 anggota keluarga sekaligus termasuk peserta yang bersangkutan. Setiap pekerja atau karyawan yang masih aktif bekerja dan tercatat sebagai pemegang kartu askes, akan dialihkan menjadi peserta BPJS PPU secara bertahap. Jadi jika anda pemegang kartu askes di masa lalu dan statusnya masih aktif maka anda sama halnya sebagai peserta BPJS PPU.

c. BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI)

Yang ketiga jenis peserta BPJS kesehatan adalah BPJS PBI atau peserta bantuan iuran, peserta ini hanya diperuntukan untuk warga miskin dan warga tidak mampu menurut data yang tercatat di dinas sosial, peserta ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran karena iuran bulanan bpjs sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah. Peserta BPJS jenis ini hanya berhak atas kelas III, dan hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di puskesmas kelurahan atau desa setempat. Seluruh warga yang dulunya pemegang jamkesda dan jamkesmas akan dialihkan menjadi peserta BPJS PBI.

2. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja indonesia, setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS ketenagakerjaan dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung oleh perusahaan. (Sumber: Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan:2017). BPJS Ketenagakerjaan mempunyai status sebagai Badan Hukum Publik sehingga pertanggungjawabannya langsung dari presiden sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan hukum publik. PT. Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penembahan Jaminan Pensiun mulai pada tanggal 1 Juli 2015. Jaminan sosial tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah mendaftarkan diri ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan berupa sanksi administratif.

2.5 Konsep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur bahwa pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap peserta berupa perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerja/buruhnya berhak memenuhi ketentuan dan persyaratan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan terdapat dua jenis peserta meliputi :

1. Penerima Upah (PU)

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja penerima upah biasanya selalu terikat dengan perjanjian kontrak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja mengenai anggaran gaji, waktu kerja dan sarana prasarana selama bekerja.

2. Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja bukan penerima upah adalah orang yang bekerja melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari hasil kegiatan atau usahanya. Pekerja ini dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi akan diberikan secara bertahap oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan mulai dari teguran, pemberian denda, sampai dengan pencabutan layanan publik tertentu.

Perspektif Islam Terhadap Kepedulian Sosial Tenaga Kerja

Islam menempatkan kaum tenaga kerja (buruh) sedemikian tinggi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim, Amsyru bin Maqruri Bin Suwaid, berkata : “kami melewati Abu Dzar di Rabadzah dan ia mengenakan Burdun (baju rangkap) begitu juga budaknya. Abu Dzar ra berkata :“ pernah terjadi kata-kata kasar antara saya dan saudara saya yang Ibunya bukan bangsa Arab (Sahaya), saya hinakan ia dari segi ibunya. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka setelah saya berjumpa

Rasulullah SAW, Beliau berkata : “Kamu ini orang yang memiliki sifat Jahiliyah, hai Abu Dzarr ”. Kata Saya: Barang siapa yang memaki-maki orang tentu bapak dan ibunya akan dimaki-maki pula. Berkata Beliau : “Sesungguhnya kamu ini orang yang memiliki sifat jahiliyah, sahaya-sahaya itu adalah saudara kamu pula yang kebetulan di bawah tangan kamu. Maka berilah makan seperti kamu makan, berilah pakaian seperti kamu pakai, dan janganlah mereka dipaksa bekerja lebih dari tenaga mereka, jika akan dipaksakan juga mereka harus kamu bantu”.

Dari hadist tersebut terkandung ajakan untuk memperlakukan para pekerja/buruh sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Selain itu terdapat juga ajakan untuk lemah lembut dan tidak merasa mempunyai status yang lebih dibandingkan para buruh. Dengan demikian gap yang ada antara pimpinan/bos dengan buruh dapat terminimalisir.

Sehingga berlakulah ayat al-ahqaf:19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

K3 terdiri dari dua subjek, yaitu kesehatan kerja dan keselamatan kerja.

Kesehatan kerja merupakan usaha agar memperoleh kondisi kesehatan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan kerja secara optimal. Kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi semua warga negara, bukan hanya sekedar kebutuhan individu. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhi setiap kebutuhan kesehatan dari rakyatnya. Sebagaimana contohnya Rasulullah yang mengutus seorang dokter untuk Ubay bin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ka'ab. Akan tetapi berbeda halnya dengan keselamatan kerja yang belum dapat dipastikan sebelumnya, karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang kaitannya sama dengan penelittian penulis adalah sebagai berikut :

1. Dwi Elisa Army (2017)

Judul Skripsi : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial Dari

Sektor Perusahaan di Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah peran

BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial

dari sektor perusahaan di kota Padang ini masih menjadi sorotan karena

ada beberapa perusahaan yang tidak mengetahui teknis dan terkendala

mengenai penunggakan iuran kepada pekerja perusahaan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana

tindakan BPJS Ketenagakerjaan sedangkan perbedaan dalam penelitian

terdahulu dan penulis adalah dalam penelitian terdahulu lebih

meningkatkan kepesertaan hanya dari sector perusahaan saja sedangkan

dalam penelitian penulis lebih membahas mengenai bagaimana upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor tenaga kerja informal dan badan usaha informal di kota Pekanbaru.

2. Armila Ernisa Zulfa dan Ida Hayu Dwimawanti (2016)

Judul Penelitian : Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. Hasil penelitian ini adalah Kantor Cabang Semarang Pemuda secara internal kepesertaan sudah baik, namun secara eksternal di lingkungan masyarakat pekerja informal dapat dinyatakan belum optimal. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya pekerja sektor informal yang belum tahu pentingnya keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal belum tersampaikan dengan baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terhadap perluasan kepesertaan dimana penelitian terdahulu meningkatkan kepesertaan dari sector informal yaitu para pekerja diluar PNS dan industry sedangkan penelitian penulis pada tenaga kerja dan badan usaha sektor informal dan BPU di kota Pekanbaru.

3. Raden Dendy Yudha Prawira (2015)

Judul Skripsi : Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi BPJS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan buruh belum optimal dikarenakan beberapa faktor eksternal dan internal yang mengakibatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan kota Tangerang belum dapat dikatakan efektif untuk kesejahteraan buruh. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah membahas bagaimana tindakan BPJS Ketenagakerjaan sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai kesejahteraan buruh di kota Tangerang sedangkan dalam peneliti membahas mengenai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tenaga kerja dan badan usaha sektor informal.

4. Ahmad Jamaludin (2017)

Judul Skripsi : Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hasil dari penelitian ini adalah meminjau tinjauan yuridis isi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak sesuai dengan amanat pasal 28H ayat 3 yang mengatakan bahwa jaminan sosial harus diberikan ke seluruh kalangan masyarakat terutama bagi para pekerja selaku pembagunan perekonomian bangsa berasaskan kesejahteraan dan keadilan sosial, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak tertera bagi penyelenggaraan jaminan sosial terhadap pekerja sektor informal maupun mandiri. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah objek yaitu membahas mengenai penyelenggaraan jaminan sosial terhadap pekerja informal yang masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam jaminan dan asuransi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial bagi pekerja informal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji dalam bidang hukum yaitu tinjauan yuridis antara amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang dikatakan belum sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Definisi Konsep

Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi tentang penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan
2. Manajemen SDM adalah salah satu bidang dari manajemen umum dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensi, kemampuan dan ketrampilan, yang tepat guna, berdaya guna dan berpribadi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat luas
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial . BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan sosial yang memberikan asuransi, kesejahteraan dan melindungi hak perlindungan para tenaga kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap peserta berupa perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerja/buruhnya berhak memenuhi ketentuan dan persyaratan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu penelitian diukur, kemudian juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. Demi kelancaran penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan konsep dan pengukurannya yang nantinya akan di gunakan dalam penelitian dan penulisan selanjutnya.

Tabel 2.3 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru	1. Sosialisasi (Pembinaan)	a. Sasaran b. Materi c. Metode
	2. Pengendalian	a. Monitoring b. Pelaporan c. Evaluasi

Sumber :Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indoensia Nomor:24 Tahun 2006

2.10 Kerangka Pemikiran

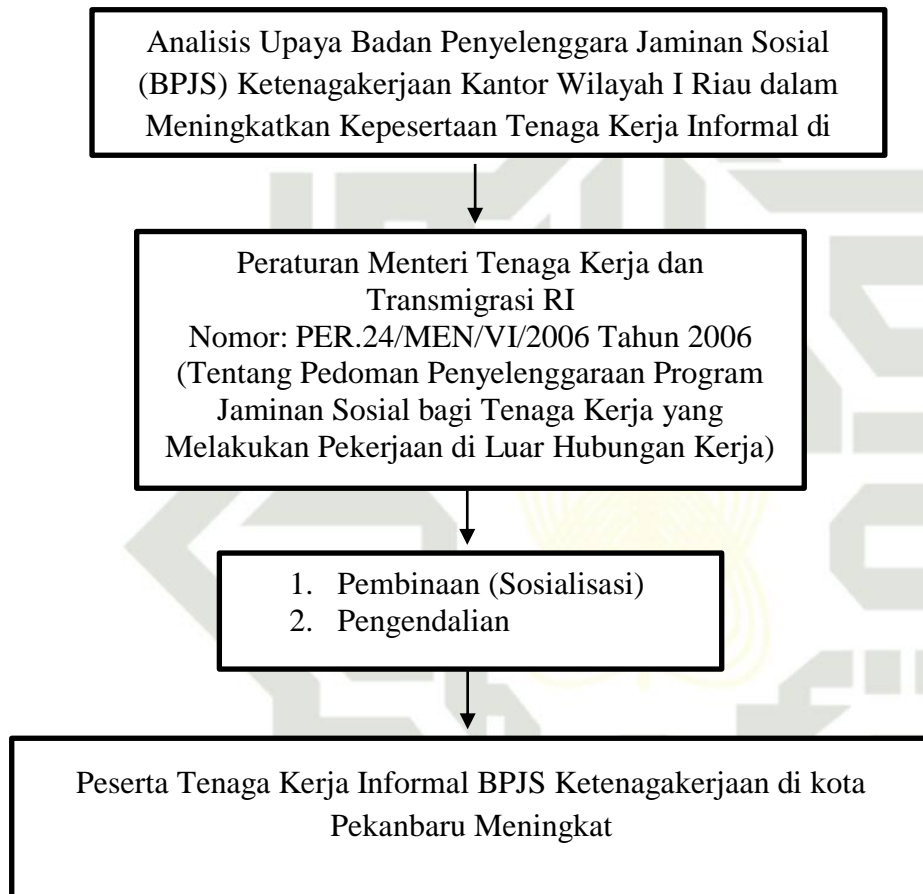
Umi Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai indikator yang telah diidentifikasi sebagai masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penting. Adapun kerangka berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian sebagai berikut.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.24/MEN/VI/2006 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moloeng (2012:4) mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti bermaksud menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan di Kota Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Tengku Zainal Abidin Kota Pekanbaru dan berbagai lokasi tenaga kerja yang ada di kota Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian pada tahun 2019 serta surat izin penelitian, dan penelitian ini dilakukan dari mulai bulan Februari hingga selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subject yang dapat dipercaya, yakni subject penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tehnik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian (Moloeng 2009 : 97), informan merupakan seorang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informant yang memberikan informasi keterangan tambahan demi mendapatkan data tambahan yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Kota Pekanbaru	1
Penata Madya SDM BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Kota Pekanbaru	1
Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Kota Pekanbaru	1
Tenaga Kerja Informal	5
Pengusaha/UMKM Informal	4
Jumlah	12

Sumber : Peneliti 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan atau terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2010:186).

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subject atau orang lain tentang subject (Herdiansyah, 2010:143).

3.6 Metode Analisis/Teknik Analisa Data

Menurut Bognan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, menaati dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian Kualitatif menurut Husein Umar (2008:4) yaitu penelitian yang bersifat luwes, baik strategi maupun bentuknya sehingga ciri-cirinya tidak bersifat definitif. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian baik seseorang, lembaga, maupun masyarakat lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. MC Drury (Collaborative Group Analysis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2007:248). Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data,
3. Menuliskan model yang ditemukan,
4. Koding yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara. Terletak antara 101 14° - 101 34° Bujur Timur dan 0 25° - 0 45° Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah :

1. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar,
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
3. Sebelah Barat: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan,
4. Sebelah Timur: Kabupaten Kampar dan Siak

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalan lintas timur sumatera terhubung dengan beberapa kota seperti Medan Padang dan Jambi. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian yang berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 27,1 derajat celcius hingga 35,5 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius.

Kota Pekanbaru saat ini memiliki satu bandara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan satu terminal bus antar kota dan provinsi yaitu

Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Kota Pekanbaru mencatat sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki ambisi besar untuk mengubah Pekanbaru yang dulu dikenal hanya sebuah kota pinggiran sungai Siak menjadi sebuah kota metropolitan, layaknya kota metropolitan lainnya baik di Indonesia maupun mancanegara.

4.2 Sejarah Singkat Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah awal terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejarah cukup panjang dalam kebijakan jaminan sosial bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 1947 dan Undang-undang No 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No 48 tahun 1952 dan PMP No 8 tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No 15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No 5 tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-undang No 14 tahun 1969

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Dari beberapa regulasi diatas, merupakan kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja pertama di Indonesia. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No 34 tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Pada perkembangan berikutnya lahir Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No 36 tahun 1995 ditetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut.

Pada Tahun 2011 lahirlah Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015 yang saat ini tersebar diseluruh kota di Indonesia baik kantor wilayah maupun kantor cabang.

4.2.1 Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

1. Visi BPJS Ketenagakerjaan

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan bagi peserta.

2. Misi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

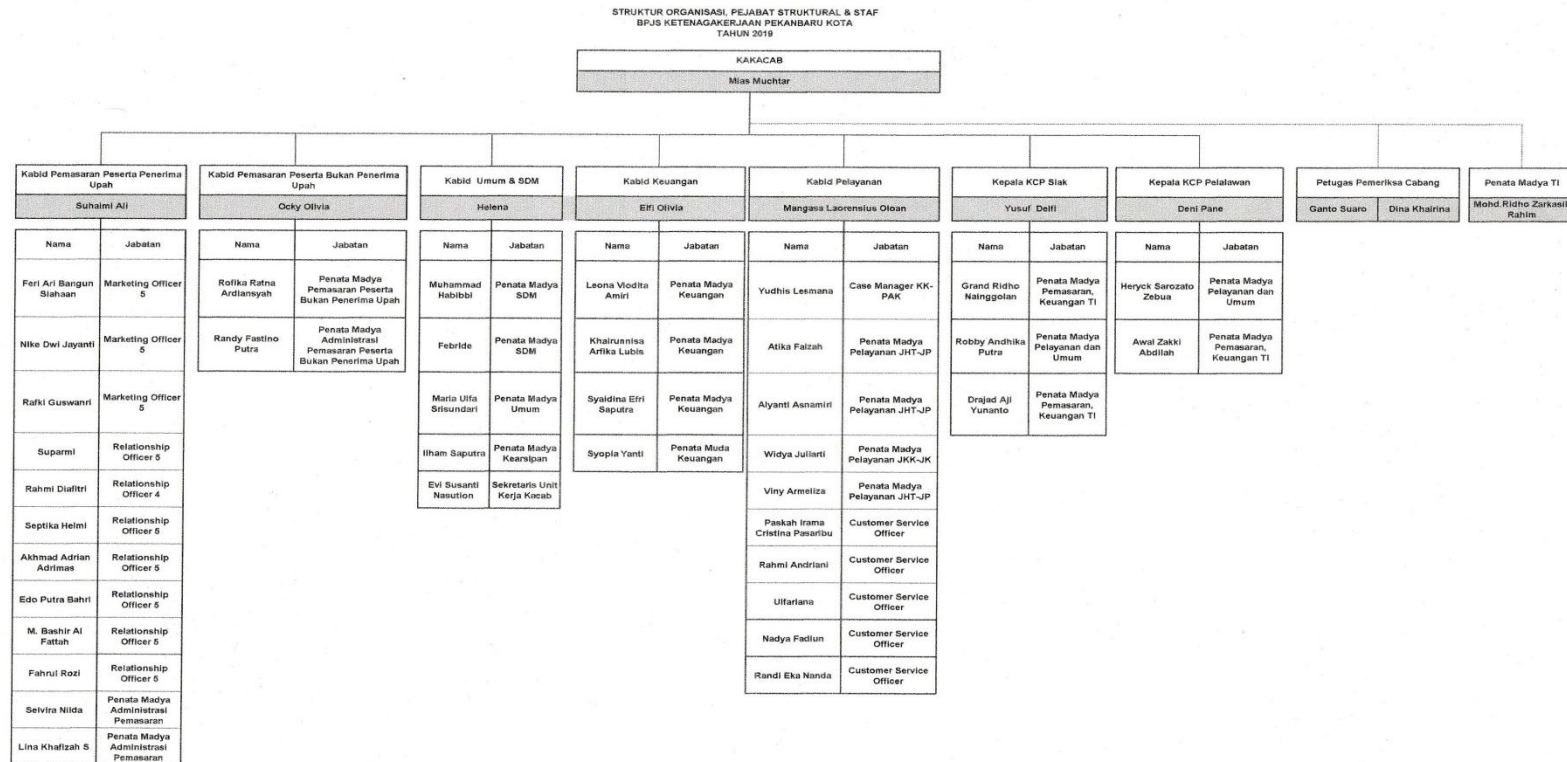
- a. Tenaga kerja, memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
- b. Pengusaha, menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas kerja
- c. Negara, berperan serta dalam pembangunan

4.2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

Menurut S.P. Siagian, (1980:113) : “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.” Adanya struktur organisasi yang merupakan acuan atau pedoman dalam pengelolaan suatu organisasi dalam rangka melaksanakan fungsi bagian tugas maupun tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



(Sumber: Kantor BPJS Ketengakerjaan Pekanbaru Kota:2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tugas Pokok Fungsi bidang di Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

1. Kepala Kantor Cabang

Bertugas untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan operasional di kantor cabang selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di kantor wilayah guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Wewenang yang dimiliki oleh kantor cabang :

1. Memberikan persetujuan penempatan investasi dana di area kerjanya sesuai dengan batasan kewenangannya
2. Merekomendasikan pembentukan kantor Cabang kelas 1 Pembantu baru
3. Merekomendasikan program PKP yang sesuai dengan kondisi cabang kelas 1
4. Mengajukan usulan mutasi dan promosi pegawai di cabang kelas 1 untuk diajukan ke kantor wilayah
5. Memberi persetujuan pengadaan barang dan jasa untuk kantor cabang kelas 1 sesuai dengan batas kewenangannya
6. Memberikan persetujuan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi
7. Memberikan persetujuan pencairan anggaran rutin
8. Menjadi perwakilan perusahaan di cabang kelas 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah (PU)

Bidang pemasaran peserta penerima upah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas merencanakan program pemasaran formal atau penerima upah dan pengelolaan kepesertaan formal melalui program Customer Relationship Managemnet (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja Relationship Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi pemasaran guna memastikan target kepesertaan formal dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki oleh Kabid pemasaran peserta PU adalah :

- a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran
- c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO
- d. Menentukan akun untuk setiap RO
- e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- f. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin
- g. Mengajukan usul reward/punishment untuk RO
- h. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya

3. Marketing Officer (MO)

Bertugas menyusun usulan program pemasaran untuk timnya, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta) serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembinaan kepada tim guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan

4. Relationship Officer (RO)

Bertugas menyusun usulan rencana pengelolaan peserta untuk timnya, mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, serta melakukan pembinaan timnya guna tercapainya tertibnya administrasi, terjalinnya hubungan baik dengan peserta dan menetapkan iuran yang telah dibebankan

5. Penata Madya Administrasi Pemasaran

Bertugas menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besaran iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Administrasi Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta
- b. Menginput data calon peserta serta percetakan dokumen
- c. Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta
- d. Memberikan dukungan terhadap tugas Marketing/Relation Officer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Bidang Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Bidang Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas merencanakan program pemasaran informal dan program khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan dibidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja RO serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan serta iuran dibidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Merencanakan dan mengkoordinasikan penerapan program PKP, selaras dengan strategi di kantor wilayah, guna efektivitas dan efisiensi program untuk mendukung kegiatan pemasaran. Wewenang yang dimiliki oleh

Kabid Pemasaran Bukan Penerima Upah (BPU) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran
- c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO
- d. Menentukan target untuk setiap RO
- e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- f. Menyetujui peneluaran anggaran rutin
- g. Mengajukan usul reward/punishment RO
- h. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah

Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta bukan penerima upah dan jasa kontruksi, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat guna memastikan target kepesertaan tercapai dan iuran yang telah dibebankan dan kepuasan peserta. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Pemasaran Peserta BPU :

- 1) Melakukan kontak dengan calon peserta
- 2) Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya
- 3) Meminta data peserta

b. Penata Madya Administrasi Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah

Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta bukan penerima upah dan jasa kontruksi, menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan pemasaran serta melakukan pelayan dokumen administrasi dan perhitungan besar iuran dan denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan peserta bukan penerima upah

7. Bidang Umum dan SDM

Bidang Umum dan SDM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan asset dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan umum bagi karyawan umum seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan dan kearsipan) serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal guna memberikan dukungan pada aspek SDM dan umum bagi kegiatan bisnis di kantor cabang. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Umum dan SDM adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kandidat calon pegawai baru
- b. Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya
- c. Merekomendasikan vendor
- d. Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam batas kewenangannya
- e. Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja pegawai
- f. Mewakili perusahaan dalam penanganan masalah hubungan industrial
- a. Penata Madya SDM

Bertugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM, administrasi karyawan dan pembinaan bagi karyawan di kantor cabang sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional

- b. Penata Madya Umum

Bertugas mengkoordinasi pelayanan umum dan penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan, pemeliharaan arsip, aset, sarana dan prasarana serta melakukan program komunikasi sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi (TI)

Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memantau dan mengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di kantor cabang guna memberi dukungan pada aspek keuangan dan TI bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi (TI) adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan mengusulkan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi
- b. Melakukan otorisasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangannya
- c. Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan
- a. Penata Madya Keuangan

Bertugas mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang di kantor cabang, melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran, serta memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan guna menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran
- 2) Memverifikasi pengajuan penggunaan dana
- 3) Menghitung kewajiban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penata Muda Keuangan

Bertugas melaksanakan pencatatan keuangan secara akurat, memproses klaim jaminan dan mengelola administrasi keuangan guna menghasilkan laporan tertib administrasi

9. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan dipimpin oleh kepala bidang pelayanan yang bertugas yang merencanakan, mengkoordinasikan, memnatau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JP, JKK dan JK serta mengkoordinasi penyelesaian kasus terdiagnosa Kecelakaan Kerja- Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional kantor cabang guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenagngan
- b. Menyetujui anggran rutin
- c. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya
- d. Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan
- a. Case Manager KK-PAK

Melaksanakan dan menindaklanjuti penyelesaian kasus terdiagnosa KK-PAK di lingkungan operasional kantor cabang, serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam penanganan kasus KK-PAK guna hingga memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut siap kembali berkerja dengan keadaan sehat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penata Pelayanan JHT-JP

Bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT dan JP, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Pelayanan JHT-JP adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan besaran klaim
- 2) Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan

c. Penata Pelayanan JKK-JK

Bertugas melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai dengan ketentuan dalam proses klaim JKK dan JK, menentukan besar klaim dan memproses klaim, serta memantau kinerja dan melakukan pembinaan kepada mitra penyedia pelayanan kecelakaan kerja, guna memenuhi kewajiban proses klaim kepada peserta dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Pelayanan JKK-JK adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan besaran klaim
- 2) Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan
- 3) Menyusun draft Perjanjian Kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Customer Service Officer (CSO)

Bertugas memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan (pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi), menangani keluhan peserta sesuai ketentuan guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan. Wewenang yang dimiliki oleh CSO adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan informasi
- 2) Memproses pengajuan jaminan
- 3) Memproses pengajuan koreksi data
- 4) Menanggapi keluhan sesuai batas kewenangannya

10. Petugas Pemeriksa Cabang

Bertugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja, membuat laporan dan mengusulkan sanksi administratif surat teguran, denda dan rekomendasi pemberhentian pelayanan publik berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan program jaminan sosial

11. Penata Madya Teknologi Informasi (TI)

Berfungsi melaksanakan pengaturan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan hardware, software dan jejaring serta mengelola data base dan aplikasi guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk efektivitas kegiatan operasional

4.2.4 Fungsi Tugas Wewenang dan Hak BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program-program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua serta memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan peserta baik tenaga kerja dan perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik (BHP) bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan kantor pusat di ibukota negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPJS dapat membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi dan kantor cabang di kabupaten/ kota. memiliki jaringan secara nasional di provinsi dan kabupaten. Untuk melaksanakan program program diatas, BPJS memiliki tugas untuk :

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Mnegelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut BPJS Ketenagakerjaan

berwenang untuk :

1. Menagih pembayaran iuran
2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk melaksanakan kewenangan diatas, BPJS Ketenagakerjaan berhak untuk:

1. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan

4.2.5 Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan adalah :

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang sistem jaminan sosial nasional
5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya
7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

4.2.6 Logo BPJS Ketenagakerjaan

Gambar IV.2
Logo BPJS Ketenagakerjaan



(Sumber : Web BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan beberapa uraian di bab sebelumnya, bahwa upaya BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di kota Pekanbaru terdapat 2 indikator upaya yaitu sosialisasi (pembinaan) yang belum sepenuhnya optimal yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh dan tidak merata di lakukan kepada tenaga kerja informal yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja informal yang belum sesuai dengan target kepesertaan dan pembinaan atau sosialisasi yang hanya terfokus pada sektor formal, jasa konstruksi dan PU. Selanjutnya upaya pengendalian meliputi monitoring, pelaporan dan evaluasi di Kota Pekanbaru cukup optimal dikarenakan berupa upaya pelaporan terhadap kementrian dan dinas tenaga kerja, koordinasi kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintahan maupun swasta di Kota Pekanbaru untuk memperluas jaringan kepesertaan dan mayoritas dilakukan terhadap tenaga kerja bidang ASN maupun honorer sehingga belum optimal terhadap pekerja informal maupun pelaku usaha UMKM di Kota Pekanbaru dan upaya evaluasi yang dilakukan oleh BPJS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru sudah baik mengenai kendala-kendala keberhasilan atau kegagalan dengan pemerintahan terkait ketenagakerjaan, DJSN dan pelaku usaha atau pengusaha untuk terus meningkatkan kinerja maupun SDM dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat yang terdapat dalam upaya BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di kota Pekanbaru yaitu dari sisi tenaga kerja informal yang masih minim kesadaran akan pentingnya dan perlu jaminan sosial bagi keselamatan dan kesejahteraan dalam bekerja, masih umumnya masyarakat yang terfokus dan menyamakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha informal yang masih ada keberatan untuk menanggung beban iuran bagi pekerjanya dan sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang kurang menyeluruh terhadap sektor informal dan hanya terfokus pada sektor formal, PU dan jasa konstruksi.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru maka peneliti dapat menarik saran sebagai berikut :

1. Diharapkan BPJS Ketenagakerjaan kota Pekanbaru dapat terus meningkatkan dan fokus pembinaan dan sosialisasi manfaat dan kebutuhan tenaga kerja informal dan BPU agar merata dan sesuai target kepesertaan

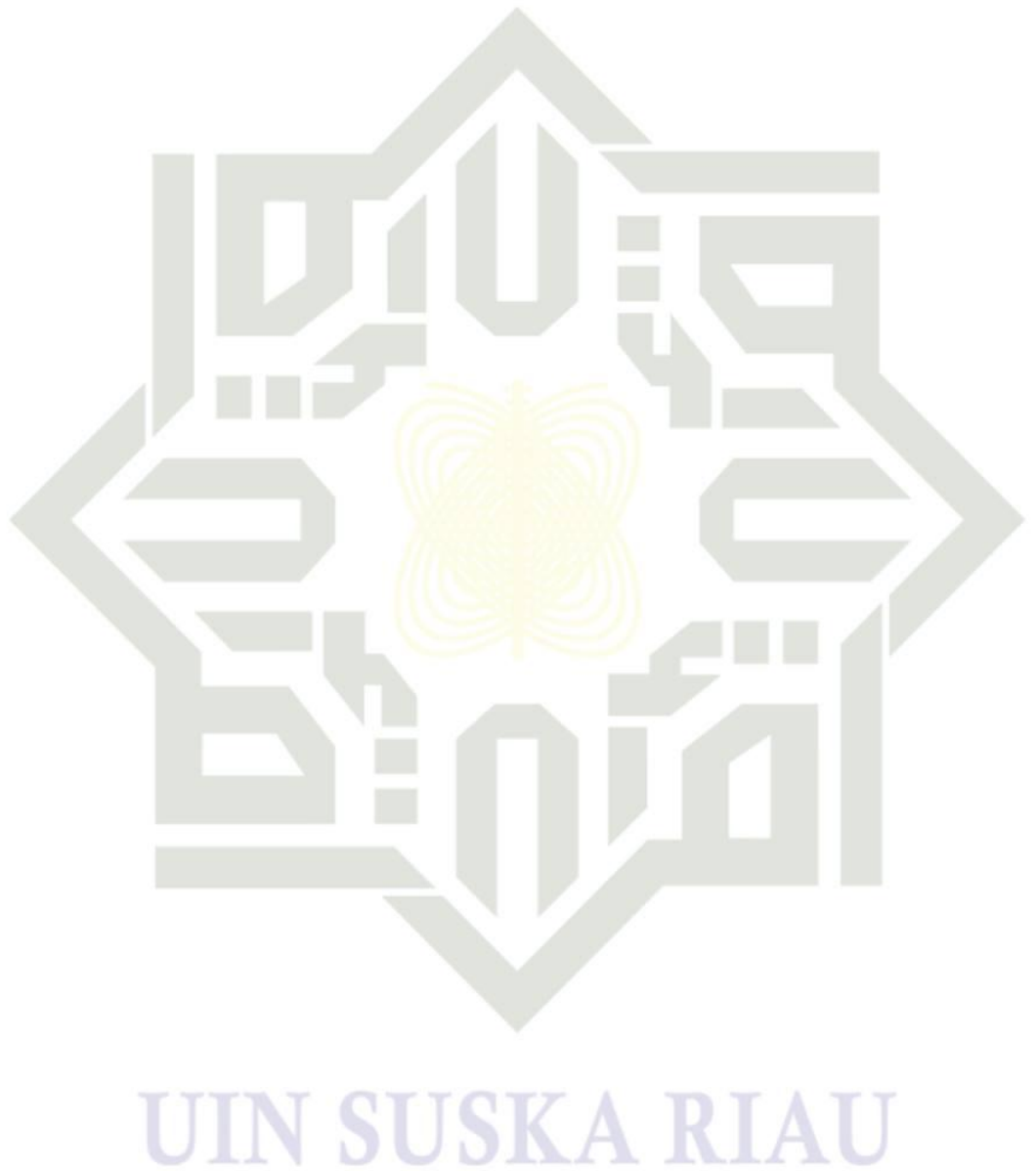
2. Diharapkan masyarakat khususnya perusahaan menengah ke bawah dan juga pekerja informal dan BPU yang ada di kota Pekanbaru untuk sama-sama menyadari pentingnya jaminan sosial guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja demi kemajuan bangsa dan negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an :

Surat Al-Ahqaf Ayat 19 (Tentang Kesejahteraan dan Keselamatan Pekerja/Buruh)

Buku :

Armansyah, Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Djumialdji, S.H. M, Hum, 2006, *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika

Hayat, 2015, *Pengantar Dunia Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Manulang. S.h H. Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rinneka Cipta

Mulyani Lilis, dkk, 2006, *Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap Pekerja Sektor Informal*. Jakarta: PT. LIPI Press

Nangri Ronald, 1994, *Pengembangan Produksi dan Sumber Daya Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rajagukguk, H.P, 2002, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelola Perusahaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota

Ridley John, 2003, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Sandang P. Siagian Prof. Dr. M, P. A, 2009, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta

Sugiono Prof. Dr, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT. Alfabeta

Samarsono Sonny, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu

Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gorontalo: Penerbit Alfabeta Bandung

Vidyaastuti Ami, Cucuani Hijrayati, Aryani Linda, Susanti Rita, Masyuri dan Herwanto Jhon, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: PT. Al-Mutjahadah Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal :

Armila Ernisa Zulfa dan Ida Ayu Dwimawanti. 2016. *Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal*. Jurnal Penelitian, 20229-412 19-1-SM

Peraturan dan Undang-Undang :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:24/MEN/VI/2006 Tahun 2006 (Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan)

Skripsi :

Dwi Elisa Army. 2017. *Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial dari Sektor Perusahaan di Kota Padang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Andalas : Padang

Raden Dendy Yudha Prawira. 2015. *Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : Serang

Ahmad Jamaludin. 2017. *Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta

Sumber lain :

Fitra, 2015. *Aturan Hukum Kepesertaan tentang BPJS Ketenagakerjaan*, <https://www.gresnews.com/berita/tips/101021-aturan-hukum-tentang-bpjs-ketenagakerjaan/> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2015 Pukul 08.30 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016. *Pengertian dan Konsep Peran.* <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=i> (Diakses pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 13.15 WIB)
- Satrio Widiant, 2018. *Manfaat dan Tingkat Kepesertaan BPJS Ketenakerjaan.* <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/27/manfaatkepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-agar-ditingkatkan-423503> (Diakses pada 27 April 2018 Pukul 05.04 WIB)
- Warta Ekonomi.Co,Id, Pekanbaru, 2017. *Jumlah Peserta Aktif BPJS-TK di Pekanbaru.* <https://m.wartaekonomi.co.id/berita150964/ini-jumlah-peserta-aktif-bpjstk-di-riau.html> (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 09.40 WIB)
- Analisa, 2018. 80% Pekerja Buruh Pekanbaru Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. <https://harian.analisadaily.com/mobile/riau/news/80-buruh-belum-terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan/551595/2018/05/08> (Diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 10.30 WIB)
- www.bpjsketenagakerjaan.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI KOTA PEKANBARU

1. Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan Kantpr Wilayah I Riau Kota Pekanbaru
2. Staff Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Kantpr Wilayah I Riau Kota Pekanbaru
3. Markertting Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantpr Wilayah I Riau Kota Pekanbaru
4. Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru
5. Pengusaha/UMKM Informal di Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM
MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI
KOTA PEKANBARU
(WAWANCARA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR
WILAYAH I RIAU KOTA PEKANBARU)**

Bagaimana sosialisasi (pembinaan) yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru agar dapat meningkat dan merata mengingat jumlah dan keberadaan pekerja sektor informal semakin meluas ?

2. Apakah terdapat beberapa kendala dalam melakukan sosialisasi berupa penyuluhan langsung ataupun melalui berbagai media elektronik, cetak dan sosial mengenai program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan apakah sudah dan bagaimana penyelesaiannya ?

3. Bagaimana mekanisme proses dalam mempersiapkan untuk menyampaikan materi pada saat sosialisasi dan bagaimana pemahaman para tenaga kerja informal ?

4. Bagaimana mekanisme metode sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat ingin melakukan sosialisasi ?

Apa sasaran utama BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal dan apakah sudah tepat sasaran melakukan sosialisasi program-program jaminan sosial ?

Bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengontrol dan meminimalisir kendala-kendala yang terjadi saat kegiatan tersebut dilaksanakan ?

Bagaimana mekanisme monitoring yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ?

Bagaimana mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ?

Bagaimana dan sejauh mana evaluasi atas kinerja dan apresiasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS UPAYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH I RIAU DALAM
MENINGKATKAN KEPESERTAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI
KOTA PEKANBARU
(WAWANCARA TERHADAP TENAGA KERJA DAN
PENGUSAHA/UMKM INFORMAL DI KOTA PEKANBARU)**

Apa penyebab anda tidak atau belum mengikuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ?

2. Apakah anda sudah mengetahui dan mendapatkan penyuluhan langsung mengenai program-program jaminan sosial dan apakah BPJS Ketenagakerjaan sudah tepat menyampaikan materi sosialisasi terkait hak, syarat, manfaat jaminan yang didapatkan, beban iuran, dan kewajiban peserta pada saat sosialisasi berlangsung ?

3. Apa kelebihan dan kendala jika anda menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ?

4. Bagaimana anda mengggapi soal beban iuran perbulan yang harus dibayar oleh peserta sektor informal dan mandiri dan apakah menurut anda sudah sesuai dan seimbang dengan gaji atau upah anda ?

Menurut tanggapan anda apakah eksistensi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sudah berjalan dengan baik mengingat dengan meningkat tenaga kerja informal di Kota di Pekanbaru dan target kepesertaan masih besar ?

Bagaimana saran atau pendapat anda mengenai sosialisasi atau evaluasi dari BPJS Ketenagakerjaan agar semakin baik kedepannya ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

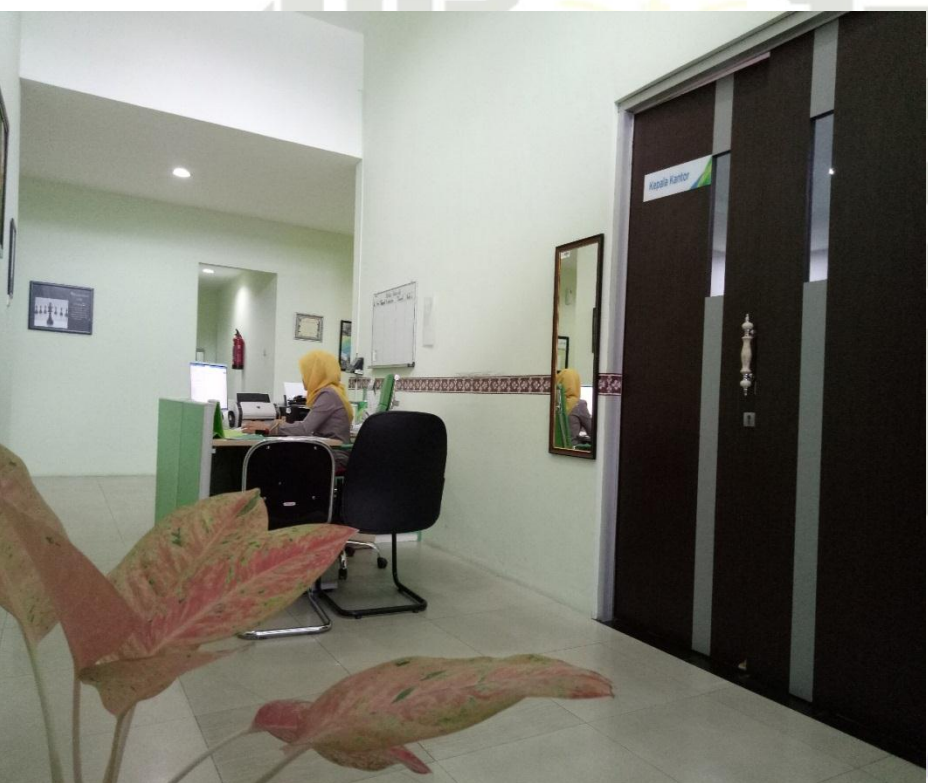
DOKUMENTASI

Gambar wawancara dan gedung BPJS Ketenagakerjaan Kantpr Wilayah I Riau Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar wawancara dan foto Toko dan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2491/2019
S i f a t : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 01 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Pimpinan
BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tengku Zainal Abidin
Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wan Ezah
NIM. : 11575200940
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan di Kota Pekanbaru"
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2492/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 01 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. **Fitria Ramadhani Agusti Nst, S. IP, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Wan Ezah
NIM : 11575200940
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1736/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 20 Februari 2019 M
14 Jumadil Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Pimpinan
BPJS Ketenagakerjaan
Kota Pekanbaru
Cabang Panam
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wan Ezah
NIM. : 11575200940
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan di Kota Pekanbaru"
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BPJS
Ketenagakerjaan

Nomor : B/8008/052019

21 Mei 2019

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Jalan H.R Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam,
Kota Pekanbaru, Riau 28293

Perihal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian / Riset

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/2491/2019 tentang pelaksanaan Kegiatan Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota dapat menerima izin penelitian Mahasiswa atas nama :

Nama : Wan Ezah
NIM : 11575200940
No. Handphone : 082170065168
Universitas/Sekolah : UIN Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kepesertaan di Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



BPJS
Ketenagakerjaan

PEKANBARU KOTA

Mias Muchtar

Kepala Kantor

HE/FE/DL 01.04

BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota Jl. T. Zainal Abidin No. 26 Pekanbaru - Riau 28112, T (0761) 33 257, 37 384, 27 036 F (0761) 33 245
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukiman dan Ibu Aisyah Jasmin. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2002 di TK Dharma Wanita di Desa Lubuk Sakai selanjutnya penulis tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SDN 036 Lubuk Sakai di Desa Lubuk Sakai lalu pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah di Desa Utama Karya dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendididn di SMAN 1 Kampar Kiri Tengah. Pada tahun 2015 akhirnya penulis diterima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SNMPTN. Kemudian pada tanggal 8 Januari sampai 28 Februari 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dan pada tanggal 16 Juli sampai 31 Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada bulan Mei 2019 penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah I Riau BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dan akhirnya penulis dinyatakan **"LULUS"** dengan mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal 27 September 2019 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.